

## **ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

*Madya Tantri Hapsari<sup>1</sup>, Gentur Jalunggono<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

*e-mail: mdya.tntry37@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya yaitu untuk menganalisis hasil Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah saat ini sebagai rujukan untuk penetapan kebijakan yang akan diterapkan pada waktu berikutnya. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan analisis tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama dan status pekerjaan utama; tingkat pendidikan; dan tingkat produktivitas. Berdasarkan hasil penelitian, rencana program yang diusulkan adalah mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

**Kata kunci:** *Pembangunan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Angkatan Kerja.*

### **ABSTRACT**

*This study has several objectives, one of which is to analyze the results of the Employment Development Index in the area of Central Java Province. It also wants to provide an overview of the current labor conditions in Central Java as a reference for the determination of policies that will be applied next time. The method used in this research process is a descriptive qualitative analysis method, namely by analyzing the workforce based on the main employment and status of the main job; level of education; and level of productivity. Based on the results of the research, the proposed program plan is about increasing the welfare of the community which will ultimately be in line with the increase in the Employment Development Index.*

**Keywords:** *Workforce Development, Employment Development Index, Labor Force.*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia dan dunia semakin hari selalu mengalami perubahan, baik menyangkut kualitas SDM, jumlah penduduk, ataupun perkembangan industri. Perkembangan perekonomian dunia yang semakin maju juga sejalan dengan perkembangan sektor industri. Sektor industri yang semakin meluas juga berkaitan erat dengan jumlah penduduk terutamanya pada penyerapan tenaga kerja. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara karena kontribusinya yang cukup besar



terhadap pendapatan dan penciptaan lapangan kerja sehingga akan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta pertambahan penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi (Nurrohman & Arifin, 2010).

Sektor industri yang baik adalah yang mampu menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungannya sebagai upaya kontribusi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti diantaranya adalah gaji, fasilitas, dan jaminan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Penyerapan tenaga kerja ini selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berperan sebagai penambahan *income* bagi pemerintah.

Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama, yaitu pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Analisis indeks pembangunan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan ini bertujuan sebagai alat ukur yang penting dalam keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Penyusunan indeks ini juga bertujuan mengevaluasi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Data penduduk Jawa Tengah yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas</b>	<b>25,181,967</b>	<b>25,492,463</b>	<b>25,782,899</b>	<b>26,062,003</b>	<b>26,341,544</b>
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>17,547,026</b>	<b>17,298,925</b>	<b>17,312,466</b>	<b>18,010,612</b>	<b>18,059,895</b>
Bekerja	16,550,682	16,435,142	16,511,136	17,186,674	17,245,548
Pengangguran Terbuka	996,344	863,783	801,330	823,938	814,347
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>7,634,941</b>	<b>8,193,538</b>	<b>8,470,433</b>	<b>8,051,391</b>	<b>8,281,649</b>
Sekolah	1,949,253	1,976,376	1,866,447	1,862,456	2,162,301
Mengurus Rumah tangga	4,361,129	4,896,482	5,240,132	5,004,910	4,918,746
Lainnya	1,324,559	1,320,680	1,363,854	1,184,025	1,200,602
<b>T P A K (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)</b>	<b>69.68</b>	<b>67.86</b>	<b>67.15</b>	<b>69.11</b>	<b>68.56</b>
<b>T P T (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)</b>	<b>5.68</b>	<b>4.99</b>	<b>4.63</b>	<b>4.57</b>	<b>4.51</b>

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Jateng (BPS, 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2014 – 2018 selalu meningkat pada setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja juga cenderung meningkat per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan semakin banyak. Namun, permasalahannya adalah apakah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mampu mengakomodasi jumlah angkatan kerja? Jika lapangan kerja yang tersedia tidak mampu mengakomodasi para pencari kerja yang tiap tahunnya cenderung meningkat maka akan menyebabkan pengangguran yang tinggi di wilayah terkait.

Berdasarkan *press release* Kementerian Ketenagakerjaan bahwa Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai terbaik pertama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Kategori Besar Tahun 2019. Dengan indeks 65,71, Jateng mampu melampaui Provinsi Jawa Timur yang meraih indeks 64,74, dan Sulawesi Selatan (64,73). Hal ini karena Disnaker, organisasi buruh, pengusaha, dan para buruh bekerja sama menaikkan indeks pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah menjadi lebih baik. Penghargaan diberikan dengan enam indikator utama,



yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja (Diskominfo Jateng, 2019).

Kenaikan IPK 2019 ini terjadi pada empat indikator utama, yaitu Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, serta Jaminan Sosial Tenaga kerja. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas.

Berdasarkan KEPMENAKER No. 206 Tahun 2017, definisi dari Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja

Ketenagakerjaan merupakan suatu bagian yang tak bisa terpisahkan dari tujuan pembangunan Indonesia. Empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia terdiri atas (a) pendayagunaan angkatan kerja nasional, (b) pemerataan kesempatan kerja, (c) perlindungan tenaga kerja, serta (d) kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Keempat tujuan tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, yang dalam prosesnya dibutuhkan suatu pengukuran untuk dapat dipantau pencapaiannya.

Penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di bidang pembangunan ketenagakerjaan serta sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Hasil evaluasi tersebut juga perlu bagi Pemerintah Pusat sebagai bahan pembinaan dan pemberian bantuan ke pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ketenagakerjaan pada umumnya serta bidang pelatihan penempatan dan perlindungan tenaga kerja (Maryanti & Hardi, 2016).



## **B. METODE**

Data yang digunakan untuk menganalisis masalah ketenagakerjaan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi Pemerintah terkait lainnya. Data publikasi BPS terutama adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2014 s.d 2018 dan publikasi Dalam Jawa Tengah Angka. Selain itu, digunakan juga variabel jumlah AK, tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan PDRB.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mengingat perekonomian di Jawa Tengah yang cukup tinggi sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik, baik yang berasal dari Jawa Tengah sendiri maupun yang berasal dari luar wilayah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Untuk analisa deskriptif kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan menggambarkan tentang pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Jawa Tengah dengan menghubungkan dengan data indeks pembangunan ketenagakerjaan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis indeks pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan metode kualitatif dan juga kuantitatif, dengan menjabarkan hasil penelitian dengan teori yang ada untuk pendukung sehingga memperoleh suatu simpulan berdasarkan angka yang diperoleh.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **C.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Tabel 1 selama periode waktu 2014-2018 jumlah angkatan kerja selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2014-2018 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 2,92% dimana jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 4,2%, sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 22,35%. Pada tahun 2014-2018 jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 4,6%, hal ini diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja bertambah sebesar



8,47%, namun disisi lain tingkat partisipasi sekolah juga mengalami kenaikan sebesar 10,39% dan yang termasuk mengurus rumah tangga meningkat sebesar 12,79%.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Provinsi Jawa Tengah Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tidak / Belum Pernah Sekolah	802,195	745,394	697,091	596,916	525,172	571,071
Tidak / Belum Tamat SD	2,812,084	2,522,067	2,406,540	255,221	2,589,809	2,386,421
SD	5,708,588	5,530,439	5,516,851	5,454,643	5,318,442	5,242,628
SMP	3,380,937	3,344,253	3,451,745	351,740	3,545,359	3,643,535
SMA	2,002,946	2,086,195	1,916,989	2,268,256	2,322,727	2,382,579
SMA	1,645,994	1,721,808	1,985,136	248,305	2,165,897	2,395,187
Diploma I/II/III / Akademi	341,194	386,550	376,599	412,555	406,626	400,023
Universitas	853,088	962,219	961,515	1,160,876	1,185,863	1,239,064
<b>Jumlah</b>	<b>17,547,026</b>	<b>17,298,925</b>	<b>17,312,466</b>	<b>10,748,512</b>	<b>18,059,895</b>	<b>18,260,508</b>

Sumber: Jateng Dalam Angka (BPS, 2019)

Apabila melihat dari jumlah daya penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang ada maka dari tabel 3 ini dapat dilihat bahwa sektor pertanian dan sektor perdagangan serta sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi selama periode waktu 2014-2018. Sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor yang paling dominan dikarenakan di Provinsi Jawa Tengah masih terbuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pada sektor ini karena masih banyaknya lahan produktif yang dapat diolah dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk sektor perdagangan masih menjadi pilihan terbanyak kedua karena sektor ini dipenuhi oleh para pendatang yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah untuk membuka lapangan usaha karena lokasi dari Provinsi Jawa Tengah ini termasuk dalam wilayah sentral di Pulau Jawa sehingga akan lebih memudahkan dalam kegiatan perdagangan. Untuk sektor industri pengolahan juga termasuk sektor yang menyerap tenaga kerja banyak karena sektor ini memberikan peluang untuk berkembang terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi sehingga sektor industri



pengolahan dinilai masih memberikan harapan yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi andalan bagi penduduk, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan yang memadai untuk memasuki dunia kerja yang membutuhkan keterampilan khusus.

Tabel 3. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Lapangan pekerjaan Utama	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Pertanian	5,173,986	4,709,707	5,067,891	4,323,993	4,204,249
Pertambangan dan Penggalian	87,212	124,545	123,108	120,541	107,647
Industri Pengolahan	3,173,217	3,267,676	3,251,749	3,563,275	3,756,317
Listrik, Gas, dan Air	27,989	33,925	37,600	47,987	183,556
Bangunan	1,269,113	1,529,103	1,430,779	1,493,314	1,508,556
Perdagangan	3,715,488	3,803,763	3,711,052	4,125,776	4,439,096
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	587,391	547,674	549,732	613,021	567,371
Keuangan	322,402	343,870	301,484	419,244	406,905
Jasa	2,193,884	2,074,879	2,037,741	2,479,523	2,071,851
<b>Jumlah</b>	<b>16,550,682</b>	<b>16,435,142</b>	<b>16,511,136</b>	<b>17,186,674</b>	<b>17,245,548</b>

Sumber: SUSENAS (BPS, 2019)

Tahun 2014 penduduk lebih banyak bekerja di sektor pertanian karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan juga lahan pertanian pada saat itu masih luas yaitu sekitar 966.647 Ha. Dikutip dari laman liputan6.com dalam wawancara Bapak Jusuf Kalla memaparkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebagai berikut: Faktor pertama, menurunnya luas lahan pertanian di Indonesia. Lahan pertanian makin kecil ukurannya per keluarga sehingga penghasilannya makin menurun. Faktor kedua, turunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian karena produktivitas yang mengalami peningkatan. Menurut Jusuf Kalla, jika produktivitas meningkat, maka orang akan mulai melakukan mekanisasi dalam



pengerjaan lahannya. Artinya, tenaga manusia akan digantikan dengan mesin sehingga otomatis akan mengurangi tenaga kerja. Faktor ketiga, kegagalan panen yang diderita petani membuat petani enggan meneruskan penggarapan lahan dan memilih untuk mencari pekerjaan di kota (Deny, 2016).

Status pekerjaan lainnya yang memiliki jumlah penyerapan tertinggi kedua pada tahun 2018 ini adalah berusaha sendiri, karena sekarang semakin banyak masyarakat yang merasa perlu memiliki jaminan untuk hari tua karena mereka sebelumnya merupakan pekerja swasta. Selain itu banyaknya penduduk yang berusaha sendiri juga disebabkan oleh sulitnya memperoleh pekerjaan karena persaingan di dunia kerja semakin ketat. Selanjutnya adalah status pekerjaan yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar pada tahun 2018 menempati posisi ketiga, namun terpantau bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 kecenderungannya mengalami volatilitas tiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama kondisi ekonomi negara yang bersangkutan. Kemudian ada status pekerjaan sebagai pekerja bebas yang perkembangannya pada tahun 2014 hingga 2018 juga tidak memiliki kestabilan. Berikutnya adalah status pekerjaan sebagai pekerja keluarga, dimana penduduk yang telah memiliki usaha yang anggota keluarganya juga merupakan pekerja bagi usaha mereka sendiri karena dinilai lebih dapat dipercaya dalam menjalankan usaha tersebut. Terakhir adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, status pekerjaan ini memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang paling rendah diantara enam status lapangan pekerjaan utama, perkembangannya pada tahun 2014-2016 sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan.

Data penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Status Pekerjaan Utama	2014	2015	2016	2017	2018
Berusaha sendiri	2,856,338	2,680,501	2,632,414	3,298,138	3,205,626
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	3,189,835	2,934,359	3,087,297	2,769,598	2,955,528
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	639,016	584,294	500,148	505,152	615,843
Buruh/Karyawan/Pegawai	5,250,046	5,707,051	5,746,630	6,320,187	6,120,509
Pekerja bebas	2,181,247	2,335,081	2,296,480	2,392,531	2,240,716
Pekerja keluarga/tak dibayar	2,434,200	2,193,856	2,248,167	1,901,068	2,107,326
<b>Jumlah</b>	<b>16,550,682</b>	<b>16,435,142</b>	<b>16,511,136</b>	<b>17,186,674</b>	<b>17,245,548</b>

Sumber: SUSENAS (BPS, 2019)

## C.2 Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga perlu ditunjang oleh Pendapatan daerah atau PDRB. Hal ini dinilai sangat penting karena tanpa adanya dana maka produktivitas sulit untuk ditingkatkan. Selama kurun waktu 2014-2018 jumlah PDRB mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini merupakan kemajuan dari sisi ekonomi karena penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan, seiring dengan itu jumlah tenaga kerja juga bertambah pada kurun waktu tahun 2014-2018 sehingga produktivitas penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan selama tahun tersebut, artinya tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah mampu membangun provinsi ini melalui kemampuan dan produktivitas mereka.

Tabel 5. Produktivitas Penduduk yang Bekerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Item	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB (Rp)	764,959,151	806,765,092.2	849,099,354.7	893,750,437.2	941,283,278.3
Tenaga Kerja (Orang)	16,550,682	16,435,142	16,511,136	17,186,674	17,245,548
<b>Produktivitas (Rp/Orang)</b>	<b>46.2191921</b>	<b>49.08780783</b>	<b>51.42585917</b>	<b>52.00252458</b>	<b>54.58123327</b>

Sumber: Jateng Dalam Angka (BPS, diolah)



Berdasarkan tahun 2014-2018 upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perubahan bahkan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang ditetapkan berada diatas KHL (Komponen Hidup Layak). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, standar KHL terdiri atas beberapa komponen yaitu:

1. Makanan & Minuman (11 items)
2. Sandang (13 items)
3. Perumahan (26 items)
4. Pendidikan (2 item)
5. Kesehatan (5 items)
6. Transportasi (1 item)
7. Rekreasi dan Tabungan (2 item)

Pembangunan ketenagakerjaan selain dilihat dari angka PDRB juga dapat diketahui dari upah yang diterima oleh pekerja setiap bulannya karena upah yang diterima oleh pekerja tersebut menunjukkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dari pekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Ini adalah rata-rata dari UMP tahun 2014 berdasarkan 35 Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebesar Rp 1.158.027 sedangkan KHL saat itu adalah Rp 1.170.176. Kemudian untuk tahun 2015 UMP Provinsi Jawa Tengah dari rata-rata 35 Provinsi sebesar Rp 1.294.506 dan KHL tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.289.792, sedangkan pada tahun 2016 UMP Provinsi Jawa Tengah tercatat mencapai angka Rp 1.502.810 dengan besarnya KHL 2016 yaitu Rp 1.497.956. Hal ini membuktikan perhatian pemerintah dalam menetapkan standar upah sudah cukup untuk para pekerja. Namun pada kenyataannya masih banyak para pekerja yang menerima upah/pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan dari status pekerjaan utama seperti pekerja buruh, akan tetapi yang menerima upah/ pendapatan di atas UMP juga mengalami peningkatan selama periode waktu 2014-2018, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah hal ini tentunya masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.



Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah mencatat pelanggaran dimana ratusan perusahaan di Jawa Tengah masih memberikan upah kepada karyawannya di bawah standar Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Jawa Tengah. Tercatat dari hasil rekapitulasi Disnaker Jawa Tengah selama 2018, bahwa dari sejumlah 3.122 ribu perusahaan yang diperiksa, terdapat 437 perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini mempertegas kondisi kesejahteraan buruh yang semakin memprihatinkan.

### **C.3 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah**

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 206, 2017). Sembilan indikator utama yang dimaksud, yaitu:

1. Perencanaan tenaga kerja;
2. Penduduk dan tenaga kerja;
3. Kesempatan kerja;
4. Pelatihan kerja dan kompetensi kerja;
5. Produktivitas tenaga kerja;
6. Hubungan industrial;
7. Kondisi lingkungan kerja;
8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan
9. Jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah menggunakan acuan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Perencanaan tenaga kerja harus dilakukan secara serius baik di tingkat pusat maupun daerah, selain itu juga harus konsisten dan tepat sasaran. Jika segala perencanaan itu dilakukan dengan baik maka pasar tenaga kerja akan mampu menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan setiap sektor terkait di daerah setempat. Penyediaan tenaga kerja akan lebih terarah terkhusus dalam memenuhi kebutuhan perusahaan jika itu dilakukan dengan perencanaan yang baik, tidak saling membedakan walaupun itu



milik pemerintahan maupun milik swasta. Tenaga kerja yang telah disiapkan dengan baik ini diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja formal sehingga akan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Di era modern ini mulai dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan yang baik sesuai dengan standar karena pada dasarnya tenaga manusia akan segera digantikan dengan tenaga mesin yang mana hasil produksi akan lebih berkualitas, sedangkan pelatihan dan training untuk peningkatan mutu individu sebagai tenaga kerja masih sangat kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan produktivitas di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah yang akhirnya menyebabkan PDRB Jawa Tengah terpantau rendah. Hubungan industrial yang seharusnya mampu menyumbang banyak terhadap PDRB melalui pembangunan ketenagakerjaan juga nyatanya tidak berpengaruh terlalu besar, hal ini disebabkan belum banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor pekerjaan utama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Hal ini berarti kinerja pemerintah daerah Jawa Tengah dalam bidang ketenagakerjaan sudah baik.

Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan hasil IPK 2019 sebesar 61,06, yang artinya terjadi peningkatan sebesar 0,25 dibandingkan IPK 2018 yakni sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai terbaik pertama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Kategori Besar Tahun 2019 dengan indeks 65,71. Penganugerahan Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2019 didasarkan pada pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif seperti meningkatnya jumlah angkatan kerja mencapai dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka mencapai. Dalam pembahasan lain, pada penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Jawa Tengah juga tidak tersebar dengan merata. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama didominasi menurut status sebagai buruh/ karyawan/ pegawai pada tiap tahun di rentang waktu 2014-2018.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) selama rentang waktu 2014-2018 mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan kategori Besar Terbaik Pertama dengan indeks 65,71. Capaian penghargaan yang diperoleh tersebut dapat menjadi satu tampilan positif yang dapat dilihat publik. Harapannya adalah akan membuka mata para calon investor untuk melihat potensi Provinsi Jawa Tengah. Namun meskipun begitu, masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya mengenai buruh karena isu tentang buruh hanya sebatas upah, padahal banyak hal yang masih perlu dipenuhi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Beberapa saran dan masukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, terutama dari sisi upah/ pendapatan dan juga keselamatan kerja agar dapat meningkatkan produktivitas para pekerja.
2. Perlu adanya pembekalan atau pelatihan khusus bagi angkatan kerja yang memiliki riwayat pendidikan di bawah jenjang SMA.
3. Agar Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Jawa Tengah selalu baik maka pemerintah perlu lebih fokus pada pengembangan beberapa indikator ketenagakerjaan yang notabene masih kurang menyumbang terhadap pembangunan ketenagakerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Deny, S. 2016. *Wapres JK Ungkap Alasan Jumlah Pekerja Pertanian Terus Menurun*. [liputan6.com](http://liputan6.com) diakses pada 6 Juli 2020.
- Diskominfo Jawa Tengah. 2019. *Jateng Terbaik 1 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Besar*. [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id) diakses pada 8 Juli 2020.
- Maryanti, S., & Hardi. 2016. Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, VIII(2), 83-96.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 206. 2017. *Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan.
- Nurrohman, R., & Arifin, Z. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, VIII(1).